

**STRATEGI PENGEMBANGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)  
MENUJU KEMANDIRIAN UPT (UNIT PELAKSANA TEKNIS)  
(Studi Kasus UPT-KPH Jeneberang II Meliputi Kabupaten Bantaeng,  
Bulukumba, dan Sinjai)**

*Strategy For Development Of Forest Management Units (FMU) Towards Independence  
Of Technical Implementing Unit (TIU)  
(Case Study Of UPT-KPH Jeneberang II Covering Bantaeng, Bulukumba, and Sinjai  
Regencies)*

**Andi Sri Ekawati Syam\*<sup>1</sup>, Nuraeni<sup>2</sup>, Iskandar Hasan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Agroteknologi, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia

e-mail: [andisrieka9@gmail.com](mailto:andisrieka9@gmail.com) [nuraeni.nuraeni@umi.ac.id](mailto:nuraeni.nuraeni@umi.ac.id) [iskandar.hasan@umi.ac.id](mailto:iskandar.hasan@umi.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to (1) analyze internal and external environmental factors that determine the independence of forest management by UPT-KPH Jeneberang II, (2) formulate a strategy for developing UPT-KPH Jeneberang II towards independence. Data was collected using field survey methods, in-depth interviews and literature studies. Data were analyzed descriptively and SWOT. The results showed that the internal, and external environmental factors that determine the independence of UPT-KPH Jeneberang II in forest management are Human Resources (HR) according to the required competencies and forest management planning documents (strengths) and forest restoration (weaknesses). Meanwhile, external environmental factors are determined by FMU business management rules (opportunities) and the forest area boundary demarcation has not been implemented (threats). Based on these supporting and inhibiting factors, the strategies needed in the development of UPT-KPH Jeneberang II towards independence are (1) Strengthening the implementation of regulations that support KPH business management by KPH HR with the availability of good forest management planning documents, (2) Increasing involvement the parties in the activities of sustainable forest use, management of social aspects, and forest protection and conservation, (3) Utilizing regional regulations to support forest utilization cooperation by encouraging the development of superior and non-superior product commodities.*

**Keywords:** Strategy; Development; Descriptive Analysis; SWOT analysis; FMU Independence

**PENDAHULUAN**

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dianggap sebagai solusi atas semakin meluasnya hutan negara yang secara de facto menjadi open access. Ini berarti KPH dapat menjadi wujud kelembagaan yang menjadi ajang mobilisasi sumber daya kehutanan ke lapangan sehingga dapat menahan dinamika perubahan tata ruang di daerah. Diharapkan dengan keberadaan KPH, kawasan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga

tujuan pengelolaan hutan lestari dapat tercapai.

Melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 menetapkan luas wilayah kelola UPT-KPH Jeneberang II sebesar ± 30.216 Ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 18.178 Ha, Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas ± 3.237 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 8.801 Ha.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018, di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan wilayah kelola untuk 16 (enam belas) UPT KPH

dimana UPT-KPH Jeneberang II memiliki wilayah kerja yang mencakup 3 (tiga) wilayah administrasi kabupaten yaitu: Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.

Pengelolaan hutan oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi. Dalam hal ini seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Diharapkan dengan dibentuknya KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) kelestarian hutan dapat tercapai, karena dalam kawasan hutan tersebut telah memiliki "pengelola" (KPH) yang harus bertanggungjawab baik dalam hal perencanaan pengelolaan hingga implementasi di lapangan.

KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) diharapkan bisa menjadi unit pengelolaan yang mandiri secara finansial (self-financing management unit) yang secara profesional mampu mengakomodasi aspek ekologi, sosial, serta ekonomi (Suwarno, 2015). Kemandirian KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang dimaksudkan adalah mampu menjalankan layanan publik dengan baik mencakup dalam hal pengelolaan operasi maupun pendanaan. Lembaga KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) harus mampu memberi respon cepat terhadap kebutuhan lapangan dengan menekan proses yang terlalu birokratis (Nugroho et al., 2013). Efektivitas pengelolaan KPH sangat terkait dengan tujuan pembentukan KPH (produksi, konservasi, lindung) dan proses pengelolaan KPH (tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi) (Karsudi, Soekmadi, dan

Kartodihardjo, 2010). Sedangkan efisiensi organisasi KPH sangat terkait dengan model kelembagaan yang dibangun serta dukungan sumber daya yang tersedia (Karsudi et al., 2010).

UPT-KPH Jeneberang II memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan kompeten, dokumen perencanaan pengelolaan hutan serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan wilayah kelola seluas  $\pm 30.216$  Ha, UPT-KPH Jeneberang II memiliki potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang bisa dikembangkan sebagai sumber pendapatan bagi petani dan KPH yang bisa membiayai sebagian tugas pokok. Akan tetapi, sampai saat ini sampai saat ini operasionalisasi dan pendanaan KPH Jeneberang II masih didukung secara penuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat. Pembangunan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Ada tiga persoalan mendasar dalam pembangunan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yaitu kelembagaan, kewirausahaan, dan pemberdayaan. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah mekanisme terstruktur dimana pembangunan KPH tidak hanya sekedar memerlukan peraturan sebagai pendukungnya, tetapi juga berbagai bentuk pendekatan dan strategi untuk menggerakkan semua komponen kearah transformasi kelembagaan KPH yaitu dari KPH pelaksana menjadi KPH pengelola.

Guna mendorong kemandirian UPT-KPH Jeneberang II, maka diperlukan penelitian untuk merumuskan "Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Menuju Kemandirian UPT (Unit Pelaksana Teknis)" yang dapat mengidentifikasi dan mengkaji faktor internal dan faktor eksternal sebagai penghambat dan pendukung kemandirian UPT-KPH.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode observasi dan survey untuk memperoleh informasi yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan dan hipotesis.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021. Penelitian dilaksanakan pada wilayah kerja UPT-KPH Jeneberang II yang meliputi Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan kuisisioner. Sumber data sekunder diperoleh dari Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) UPT-KPH Jeneberang II dan dokumen terkait.

Sampel penelitian ini ditetapkan dengan metode purposive sampling yaitu dipilih secara sengaja dengan pertimbangan yang bersangkutan dianggap memahami dan mengetahui tentang pengelolaan hutan oleh UPT-KPH Jeneberang II dan diperoleh 24 sampel

yang menjadi responden yaitu pejabat eselon, pejabat fungsional, staf, KTH dan pemegang izin kerjasama.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan variable. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian yaitu skala *Likert*. Sedangkan untuk perumusan strategi menggunakan analisis SWOT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Identifikasi Faktor Internal (IFAS) dan Faktor Eksternal (EFAS)**

Sebelum merumuskan arah strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian, dilakukan identifikasi faktor internal dengan menggunakan matriks faktor strategis internal (Internal Factors Analysis Strategic/IFAS) dan analisis faktor eksternal Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

No.	Faktor Internal	Nilai Rata-rata	Keterangan
1.	Wilayah kelola	2,92	Kekuatan
2.	SDM sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan	3,08	Kekuatan
3.	Standar Operasional Prosedure (SOP)	2,42	Kelemahan
4.	Sarana dan prasarana	2,88	Kekuatan
5.	Data dan informasi	2,83	Kekuatan
6.	Dokumen perencanaan pengelolaan hutan	3,00	Kekuatan
7.	Dokumen perencanaan bisnis dan investasi	2,25	Kelemahan
8.	Perlindungan hutan dan konservasi	2,71	Kekuatan
9.	Penggunaan hutan secara lestari	2,63	Kekuatan
10.	Pengelolaan aspek sosial	2,75	Kekuatan
11.	Pemulihan hutan	2,21	Kelemahan
12.	Kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan	2,33	Kelemahan
<b>Faktor Ekstrenal</b>			
1.	Penataan batas Kawasan hutan	1,50	Ancaman
2.	Penataan blok fungsi KPH	1,83	Ancaman
3.	Aturan-aturan pengelolaan bisnis KPH	2,96	Peluang
4.	Regulasi/kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik	2,42	Ancaman
5.	Anggaran (sumber daya keuangan)	2,17	Ancaman
6.	Keterlibatan para pihak (legislatif, eksekutif, swasta dan lembaga)	2,54	Peluang
7.	Dana dalam rangka kerjasama dan pengembangan investasi	1,92	Ancaman
8.	Perda tentang kerjasama dalam pemanfaatan hutan (sebagai sumber pendapatan)	2,58	Peluang

Sumber: Data Diolah, 2021.

## 2) Analisis Faktor Strategic Internal (IFAS)

Analisis faktor strategis internal adalah pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dengan memberikan skoring bobot dan rating pada setiap faktor strategis menggunakan matrik IFAS. Matriks Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS) adalah alat manajemen strategis untuk mengetahui hasil evaluasi internal terhadap pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang II.

Menurut Rangkuti (2006), berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara 1,0

dan 5,0 dengan rata-rata skor 2,5. Jika nilai di bawah skor 2,50 menandakan bahwa secara internal pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang II lemah, sedangkan jika nilai berada di atas skor 2,50 menandakan posisi internal kuat. Pembobotan dan penilaian untuk matriks IFAS diperoleh dari hasil analisis lingkungan internal UPT-KPH Jeneberang II yaitu mengidentifikasi faktor-faktor internal kemudian dilakukan penilaian. Hasil skoring masing-masing faktor internal diolah dalam matriks IFAS sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks IFAS

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan (Strenghts)</b>			
Wilayah kelola	0,08	2,92	0,24
SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan	0,09	3,08	0,27
Sarana dan prasarana	0,08	2,79	0,22
Data dan Informasi	0,08	2,88	0,24
Dokumen perencanaan pengelolaan dan tata hutan	0,08	2,83	0,23
Perlindungan hutan dan konservasi	0,08	3,00	0,26
Penggunaan hutan secara lestari	0,08	2,71	0,21
Pengelolaan aspek sosial	0,08	2,63	0,20
<b>Sub Total</b>	<b>0,08</b>	<b>2,75</b>	<b>0,22</b>
<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>0,74</b>		<b>2,10</b>
Standar Operasional Prosedur (SOP)			
Dokumen perencanaan bisnis dan investasi	0,07	2,42	0,17
Pemulihan hutan	0,06	2,25	0,15
Kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan	0,06	2,21	0,14
<b>Sub Total</b>	<b>0,07</b>	<b>2,33</b>	<b>0,16</b>
<b>Total</b>	<b>0,26</b>		<b>0,61</b>
	<b>1,00</b>		<b>2,71</b>

Sumber Data: Tabel 1

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa faktor kunci internal yang mempunyai kekuatan tertinggi adalah ketersediaan SDM yang memiliki skor 3,08. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bobot 0,09 dengan rating 3,08 dan skor sebesar 0,27. Sedangkan kelemahan utama dalam pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian adalah penyelenggaraan kegiatan pemulihan hutan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bobot yaitu 0,06 dengan rating 2,21 dan skor sebesar 0,14.

Berdasarkan hasil analisis IFAS pada Tabel 2, terlihat bahwa faktor kekuatan (*Strenghts*) mempunyai nilai sebesar 2,10 dan kelemahan (*Weakness*) mempunyai nilai sebesar 0,61. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa implementasi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Mengacu pada nilai total faktor-faktor strategis internal (nilai rata-rata = 2,50), nilai dari hasil analisis faktor internal pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian lebih besar dari nilai rata-rata yaitu 2,71. Artinya faktor internal dalam pengembangan UPT-KPH Jeneberang II

menuju kemandirian kuat atau mendukung pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian.

Berdasarkan hasil perhitungan dari faktor lingkungan internal, yaitu faktor kekuatan (*strenght*) dikurangi dengan faktor kelemahan (*weakness*) diperoleh nilai X sebagai sumbu horizontal,  $2,10 - 0,61 = 1,48$ . Dengan demikian, nilai sumbu X dalam diagram SWOT adalah 1,48.

### 3). Analisis Faktor Strategic Eksternal (EFAS)

Matriks analisis faktor strategis eksternal (EFAS) adalah alat manajemen strategis untuk audit atau mengevaluasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian. Menurut Rangkuti (2006) berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara 1,0 dan 4,0 dengan rata-rata skoring 2,50. Jika nilai di bawah skoring 2,50 menandakan bahwa secara eksternal pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian lemah, sedangkan jika nilai berada di atas skoring 2,50 menandakan posisi eksternal kuat. Berdasarkan hasil identifikasi faktor eksternal maka dibuat

matriks EFAS. Matriks EFAS diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal yaitu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal kemudian dilakukan penilaian.

Analisis faktor strategis eksternal adalah pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan eksternal dengan

memberikan bobot dan rating pada setiap faktor strategis menggunakan matrik EFAS. Hasil skoring masing-masing faktor eksternal diolah dalam matriks EFAS sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Matriks EFAS

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<b>Peluang (Opportunities)</b>			
Aturan-aturan pengelolaan bisnis KPH	0,17	2,96	0,49
Keterlibatan para pihak (legislatif, eksekutif, swasta dan lembaga) dalam mendukung operasionalisasi KPH	0,14	2,54	0,36
Perda tentang kerjasama dalam pemanfaatan hutan (sebagai sumber pendapatan)	0,14	2,58	0,37
<b>Sub Total</b>	<b>0,45</b>		<b>1,22</b>
<b>Ancaman (Threats)</b>			
Penataan batas kawasan hutan	0,08	1,50	0,13
Penataan batas blok fungsi KPH	0,10	1,83	0,19
gulasi/kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik	0,13	2,42	0,33
Anggaran (sumber daya keuangan)	0,12	2,17	0,26
Dana dalam rangka kerjasama dan pengembangan investasi	0,11	1,92	0,21
<b>Sub Total</b>	<b>0,55</b>		<b>1,11</b>
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>2,33</b>

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 3, faktor kunci eksternal yang mempunyai peluang tertinggi adalah aturan-aturan yang mendukung pengelolaan bisnis KPH. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bobot sebesar 0,17 dengan rating 2,96 dan skor sebesar 0,49. Aturan-aturan yang mendukung pengelolaan bisnis KPH merupakan peluang utama dalam pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian. Sedangkan ancaman utama dari pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian adalah penataan batas kawasan hutan dimana dari hasil penilaian memiliki nilai terendah dari faktor-faktor eksternal lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bobot sebesar 0,08 dengan rating 1,50 dan skor sebesar 0,33. Penataan batas kawasan hutan akan menjadi ancaman bagi UPT-KPH Jeneberang II karena tidak ada batas yang jelas antara kawasan hutan dengan lahan milik masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 665/MENLHK/SET JEN/PLA.0/11/2017 dan hal inilah yang memicu konflik kepemilikan lahan.

Mengacu pada nilai total faktor-faktor strategis eksternal diperoleh skoring dari hasil analisis eksternal pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu 2,33. Hal ini berarti bahwa faktor eksternal masih dalam keadaan lemah atau kurang mendukung untuk pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian

Berdasarkan hasil analisis EFAS pada Tabel 3, terlihat bahwa faktor peluang (Opportunities) mempunyai nilai sebesar 1,22, dan ancaman (Threats) mempunyai nilai sebesar 1,11. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa peluang yang dimiliki sebesar 52,36 % lebih besar dibandingkan dengan ancaman sebesar 47,64 %. Adapun nilai pada sumbu Y sebagai sumbu vertikal adalah  $1,22 - 1,11 = 0,11$ .



Dengan demikian, nilai sumbu Y dalam diagram SWOT adalah 0,11.

Berdasarkan matriks SWOT maka dapat diperoleh 4 strategi utama yaitu strategi *strength-opportunities* (SO) strategi ini digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Strategi *weakness opportunities* (WO) adalah strategi yang digunakan dengan cara menutupi semaksimal mungkin kekurangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi *strength-threat* (ST) adalah strategi yang digunakan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada dan strategi *weakness-threat* (WT) adalah strategi untuk meminimalkan kekurangan dan menghindari dari ancaman yang ada. Alternatif strategi pengembangan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

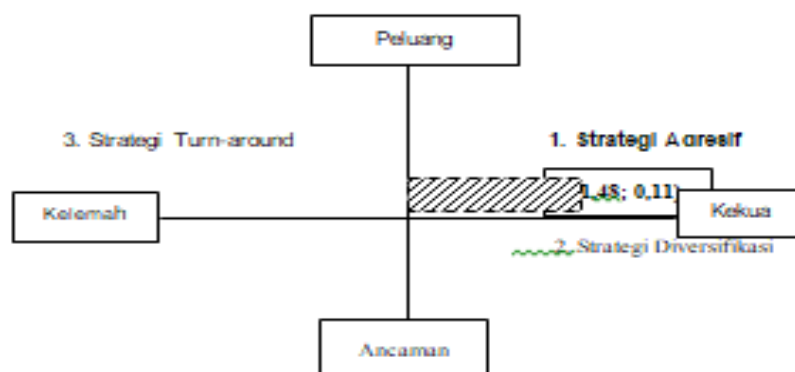
1. Pemantapan pelaksanaan aturan-aturan yang mendukung pengelolaan bisnis KPH oleh SDM KPH sebagai pengelola KPH dengan ketersediaan dokumen perencanaan pengelolaan hutan yang baik.
2. Peningkatan keterlibatan para pihak dalam kegiatan penggunaan hutan secara lestari, pengelolaan aspek sosial serta perlindungan hutan dan konservasi.
3. Memanfaatkan dukungan Peraturan Daerah (Perda) dalam kerjasama pemanfaatan hutan dengan mendorong pengembangan komoditas yang merupakan produk unggulan dan bukan unggulan
4. Pemantapan batas kawasan hutan dan batas blok fungsi KPH dengan melibatkan para pihak.
5. Memanfaatkan kewajiban rehabilitasi dan reklamasi Daerah Aliran Sungai (DAS) bagi pemegang Izin kerjasama pemanfaatan hutan untuk mempercepat pemulihan hutan.

6. Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan bidang kehutanan di luar kawasan hutan dengan melibatkan para pihak (legislatif, eksekutif, swasta, dan lembaga)
7. Peningkatan dukungan regulasi/kebijakan dalam penyelesaian konflik.
8. Peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan program dan dalam rangka kerjasama dan pengembangan investasi.
9. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam rangka transparansi pengelolaan bisnis KPH.

#### **4. Rumusan Strategi Pengembangan UPT-KPH Jeneberang II Menuju Kemandirian**

Posisi strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian berdasarkan evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dengan membandingkan kedua faktor tersebut (Rangkuti, 2006), yang selanjutnya dianalisis menggunakan matriks posisi sehingga menghasilkan titik koordinat (x, y). Nilai x merupakan selisih faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan nilai y merupakan selisih faktor eksternal (peluang-ancaman).

Berdasarkan skoring pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa posisi strategis pada nilai x adalah 1,48 dan y adalah 0,11, mendukung strategi agresif (Kuadran-I). Posisi strategi pada kuadran-I menggambarkan situasi yang sangat menguntungkan karena UPT-KPH Jeneberang II memiliki peluang yang lebih besar dibanding ancamannya, sedangkan kekuatan yang dimiliki relatif lebih unggul dari kelemahannya. Posisi koordinat gabungan evaluasi faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Analisis Strategi Pengembangan UPT-KPH Jeneberang II Menuju Kemandirian

Posisi strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II pada Gambar 6 menunjukkan nilai  $x > 0 = 1,48$  dan nilai  $y > 0 = 0,11$ . Hal ini berarti posisi strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II terletak pada Kuadran-I yang dibatasi oleh sumbu  $x$  bertanda positif dan  $y$  bertanda positif. Strategi alternatif yang dapat dianjurkan adalah strategi yang bersifat agresif (*aggressive strategy*) yaitu strategi S-O (*Strengths-Opportunities*) dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dengan demikian, pengembangan UPT-KPH Jeneberang II memiliki faktor-faktor kekuatan dalam kondisi yang baik, namun belum memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga belum berkembang secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi agresif dengan melakukan ekspansi secara maksimal dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada (*strengths-opportunities strategy*) pada UPT-KPH Jeneberang II.

Posisi strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II pada Gambar 6 menunjukkan nilai  $x > 0 = 1,48$  dan nilai  $y > 0 = 0,11$ . Hal ini berarti posisi strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II terletak pada Kuadran-I yang dibatasi oleh sumbu  $x$  bertanda positif dan  $y$  bertanda positif. Strategi alternatif yang dapat dianjurkan adalah strategi yang bersifat agresif (*aggressive strategy*) yaitu strategi S-O (*Strengths-Opportunities*) dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dengan demikian, pengembangan UPT-KPH Jeneberang II memiliki faktor-faktor kekuatan dalam

kondisi yang baik, namun belum memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga belum berkembang secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi agresif dengan melakukan ekspansi secara maksimal dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada (*strengths-opportunities strategy*) pada UPT-KPH Jeneberang II.

Pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian sebaiknya melakukan strategi S-O dimana dalam strategi S-O penulis memadukan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh UPT-KPH Jeneberang II dengan peluang yang ada. Alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu (a) Pemantapan pelaksanaan aturan-aturan yang mendukung pengelolaan bisnis oleh SDM KPH dengan ketersediaan dokumen perencanaan pengelolaan hutan yang baik; (b) Peningkatan keterlibatan para pihak dalam kegiatan penggunaan hutan secara lestari pengelolaan aspek sosial dan perlindungan hutan dan konservasi; dan (c) Memanfaatkan dukungan Perda dalam kerjasama pemanfaatan hutan dengan mendorong pengembangan komoditas yang merupakan produk unggulan dan bukan unggulan.

## KESIMPULAN

1. Faktor internal yang menentukan kemandirian dalam pengelolaan hutan oleh UPT-KPH Jeneberang II yaitu SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (skor) 0,27 merupakan kekuatan dan kegiatan pemulihan hutan (skor 0,14) merupakan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal yaitu aturan-aturan pengelolaan bisnis KPH (skor 0,49) merupakan peluang utama dan



- penataan batas kawasan hutan (skor 0,13) merupakan ancaman.
2. Strategi pengembangan UPT-KPH Jeneberang II menuju kemandirian dirumuskan berdasarkan strategi strength-opportunities (S-O). Alternatif strategi yang dapat dilakukan, yaitu: pemantapan pelaksanaan aturan-aturan yang mendukung pengelolaan bisnis oleh SDM KPH dengan ketersediaan dokumen perencanaan pengelolaan hutan yang baik, peningkatan keterlibatan para pihak dalam kegiatan penggunaan hutan secara lestari pengelolaan aspek sosial dan perlindungan hutan dan konservasi, dan memanfaatkan dukungan Perda dalam kerjasama pemanfaatan hutan dengan mendorong pengembangan komoditas yang merupakan produk unggulan dan bukan unggulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Karsudi, Rinekso, S. dan Kartodihardjo, 2010. Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua. JMHT Vol. XVI, (2): 92-100, Agustus 2010. Bogor
- Nugroho B, Hariadi K dan Soedarso S. 2013. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Rangkuti, F. 2006. Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suwarno, E. 2015. Apakah KPH Dapat Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia? Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Volume 10, No.2. Universitas Lancang Kuning,. Pekanbaru.
- UPT-KPH Jeneberang II. 2018. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) UPT-KPH Jeneberang II Periode 2019-2028. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.